



WRI INDONESIA

Seri Buklet Penurunan Emisi GRK III

# MERANCANG STRATEGI JANGKA PANJANG UNTUK AKSI IKLIM INDONESIA

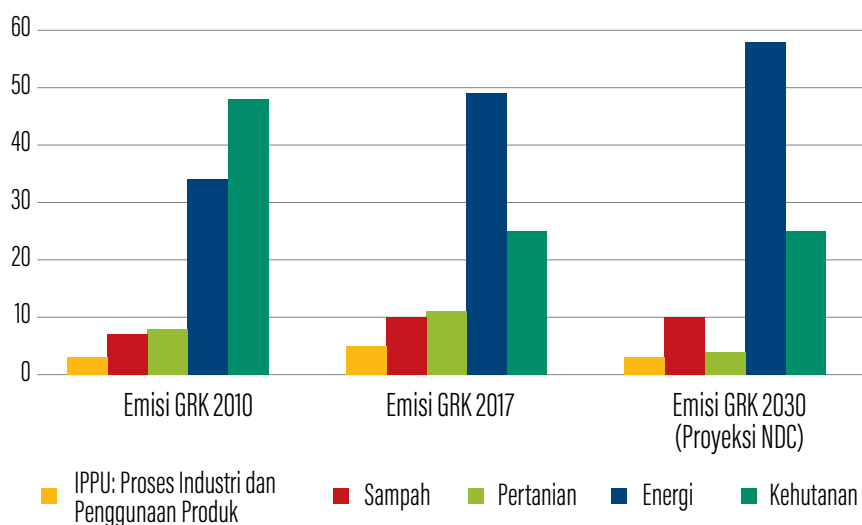
# BAB I

# STRATEGI JANGKA PANJANG AKSI IKLIM, MENGAPA DIPERLUKAN?

## PERTUMBUHAN EKONOMI, PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK, DAN KRISIS IKLIM INDONESIA.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), memprediksi ekonomi Indonesia akan melesat ke peringkat 5 negara dengan PDB terbesar dunia pada 2024<sup>1</sup>. Di sisi lain, penduduk Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 260 juta orang, akan meningkat sebanyak 67 juta orang atau lebih pada 2035<sup>2</sup>. Pertambahan jumlah penduduk ini akan diiringi dengan peningkatan kebutuhan air, pangan, dan energi, yang dapat memperparah krisis iklim.

### Sektor energi dan kehutanan, dua penyumbang emisi GRK terbesar



Sumber: Greenpeace, <https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5f8846bdafff2/tekan-emisi-gas-rumah-kaca-lewat-energi-terbarukan>

Indonesia juga salah satu kontributor emisi GRK terbesar dunia. Dari berbagai pemodelan, emisi GRK Indonesia diproyeksikan meningkat sekitar 2,9 GtCO<sub>2</sub>e<sup>3</sup> pada 2030 sesuai skenario BAU/business-as-usual (tanpa perencanaan aksi) dalam NDC (Nationally Determined Contribution). Tanpa aksi yang ambisius, emisi GRK tersebut akan meningkat hingga sekitar 4,3–6,2 GtCO<sub>2</sub>e di 2050<sup>4</sup>.

1 China could overtake the US as the world's largest economy by 2024, <https://www.weforum.org/agenda/2020/07/largest-global-economies-1992-2008-2024>

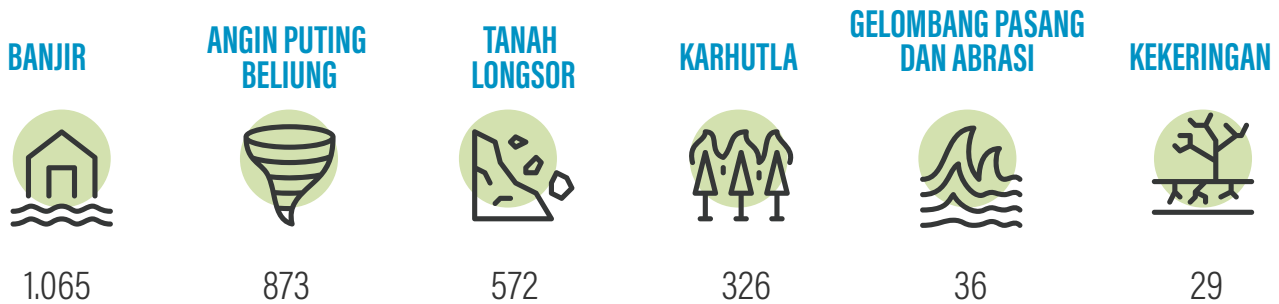
2 Chrysolite, et.al., *Op. Cit.*

3 gigaton karbon dioksida ekuivalen

4 Ibid.

## KRISIS IKLIM MENGAKIBATKAN BENCANA EKOLOGI DAN KERUGIAN EKONOMI DI INDONESIA

Berdasarkan data BNPB, di 2020 telah terjadi 2.925 bencana di Indonesia, yang didominasi bencana hidrometeorologi dengan rincian jumlah kejadian sebagai berikut:<sup>3</sup>



Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (U.S. Agency for International Development) memperkirakan, tanpa aksi yang ambisius, kerugian akibat krisis iklim di Indonesia di 2050 akan mencapai lebih dari Rp132 triliun<sup>6</sup>. Indonesia harus mempertimbangkan kondisi kerentanannya terhadap krisis iklim setelah tahun 2030.

### PERLUNYA STRATEGI JANGKA PANJANG (SJP) UNTUK AKSI IKLIM INDONESIA

Sebagai negara yang rentan sekaligus salah satu penyumbang emisi GRK terbesar, para pemimpin Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota hingga nasional, harus memiliki visi jangka panjang terkait aksi iklim. Visi itu harus dituangkan dalam sebuah Strategi Jangka Panjang (SJP) aksi iklim yang melampaui siklus pemilu nasional dan daerah.

Apa saja manfaat SJP bagi Indonesia?

-  Memberi sinyal kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin upaya menyelamatkan bumi dari krisis iklim
-  Meningkatkan kepercayaan investor terkait investasi hijau dan peluang proyek berkelanjutan lainnya

5. Sebanyak 2.925 Bencana Alam Terjadi Pada 2020 di Tanah Air, Bencana Hidrometeorologi Mendominasi, [https://bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi#:~:text=Bencana%20Hidrometeorologi%20Mendominasi-,Sebanyak%202.925%20Bencana%20Alam%20Terjadi%20Pada,Tanah%20Air%2C%20Bencana%20Hidrometeorologi%20Mendominasi&text=JAKARTA%20-%20Badan%20Nasional%20Penanggulangan%20Bencana,Selasa%20\(28%2F12\)](https://bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi#:~:text=Bencana%20Hidrometeorologi%20Mendominasi-,Sebanyak%202.925%20Bencana%20Alam%20Terjadi%20Pada,Tanah%20Air%2C%20Bencana%20Hidrometeorologi%20Mendominasi&text=JAKARTA%20-%20Badan%20Nasional%20Penanggulangan%20Bencana,Selasa%20(28%2F12).).

6. Chrysolite, et.al., *Op. Cit.*

## BAB II

# BAGAIMANA CARA MEMBANGUN STRATEGI JANGKA PANJANG UNTUK AKSI IKLIM DI INDONESIA?

### STRATEGI JANGKA PANJANG AKSI IKLIM VS KEPENTINGAN POLITIK JANGKA PENDEK

Dinamika politik dalam Pemilu, Pilpres, dan Pilkada berpotensi memunculkan kebijakan publik yang berorientasi jangka pendek. Padahal, mengatasi krisis iklim memerlukan strategi jangka panjang yang melampaui kepentingan politik yang berorientasi jangka pendek.

Berikut langkah-langkah yang bisa dijadikan panduan:

#### A. MEMETAKAN PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MEMBANGUN SJP AKSI IKLIM

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan peluang dan tantangan dalam membangun SJP tersebut. Berikut ini secara garis besar peluang dan tantangan tersebut

PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"><li><b>BAPPENAS telah meluncurkan inisiatif PPRK (Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon).</b> Melalui inisiatif ini, BAPPENAS berkomitmen menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon pertama di Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya untuk periode 2020-2024. Inisiatif ini dapat menjadi dasar penyusunan dokumen SJP.</li><li><b>RPJMN Rendah Karbon merupakan model jangka panjang BAPPENAS disertai dengan pemodelan investasi.</b> Pemodelan ini bisa memperkirakan nilai uang yang harus digerakkan dari sektor publik dan swasta dalam mewujudkan transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.</li></ol>	<p><b>Kurangnya rasa kepemilikan bersama dari direktorat lain dan kementerian terkait terhadap inisiatif PPRK BAPPENAS.</b> Penyusunan RPJMN rendah karbon belum melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga rasa kepemilikan atas model PRK masih kurang. Sebagai contoh, kurangnya keterlibatan Dirjen Pengendalian Krisis Iklim KLHK dalam inisiatif ini, padahal mereka yang bertanggung jawab atas pengajuan dokumen terkait krisis iklim Indonesia kepada UNFCCC.</p>

Sumber: Diolah dari Laporan Melintasi Horizon: Studi Strategi Iklim Jangka Panjang Untuk Masa Depan Indonesia<sup>7</sup>.

7 Ibid.

## B. MENGHUBUNGKAN MODEL ILMIAH DENGAN SJP KRISIS IKLIM

Pemodelan emisi GRK di Indonesia harus diadopsi dalam kebijakan publik. Sebuah model yang efektif memerlukan inovasi kebijakan publik yakni *co-creation*<sup>8</sup> dan *co-production*<sup>9</sup>. Inovasi kebijakan tersebut mampu menghubungkan pengembangan pengetahuan dan implikasinya terhadap kebijakan<sup>10</sup>. Pendekatan ini menuntut terciptanya hubungan baru antara aktor negara dan non-negara agar perumusan dan penilaian SJP dapat melibatkan pemangku kepentingan dengan tingkat keterwakilan yang lebih luas<sup>11</sup>.

## C. MEMILIH PRIORITAS SJP AKSI IKLIM INDONESIA

Studi pemodelan yang ada menunjukkan bahwa tingkat emisi Indonesia akan terus meningkat, terutama dari penggunaan lahan dan sistem energi<sup>12</sup>. Oleh karena itu, prioritas SJP Indonesia saat ini adalah mengevaluasi dan meningkatkan sistem energi dan penggunaan lahan nasional.

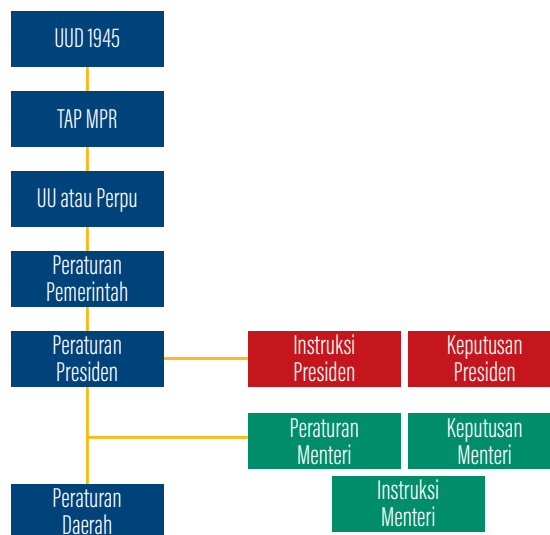
## D. MEMILIH PAYUNG HUKUM YANG TEPAT BAGI SJP AKSI IKLIM

### Prinsip Pemilihan Payung Hukum dalam SJP Aksi Iklim.

Dalam konteks SJP aksi iklim, prinsip payung hukum yang harus dipegang adalah:

1. Payung hukum harus bisa memastikan rasa kepemilikan nasional, non-partisan, meningkatkan ketahanannya dalam jangka panjang terlepas dari siklus politik.
2. SJP aksi iklim harus memberi ruang inovasi di tengah berbagai perubahan politik dan teknologi. Meskipun begitu, SJP harus cukup spesifik dan dapat diterapkan dengan baik sehingga aksi di lapangan dapat benar-benar digerakkan.

### Payung Hukum SJP Aksi Iklim di Indonesia



Sumber: UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

8 *Co-creation* mengacu pada keterlibatan pihak non-negara, termasuk pengusaha, masyarakat sipil, pemerintah daerah, komunitas penelitian dan sebagainya, dalam merancang kebijakan dan solusi terkait masalah publik.

9 *Co-production* mengacu pada upaya memanfaatkan keterlibatan publik secara lebih luas. Dalam konteks isu iklim, hal ini penting, karena tujuan dan target iklim hanya bisa tercapai jika beban dan manfaatnya dapat dibagi dengan berbagai pihak selain aktor negara.

10 Chrysolite, et.al., *Op. Cit.*

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

Melihat hierarki hukum di Indonesia dan waktu yang diperlukan untuk mencapai rencana jangka panjang (hingga 2050 atau 2100) cukup lama, SJP perlu memiliki payung hukum yang dapat bertahan dari dinamika politik, misalnya melalui Keputusan MPR atau UU. Semakin tinggi hierarki suatu produk hukum, semakin permanen keberlakuannya, karena diperlukan upaya politik yang signifikan untuk mengubahnya.

## E. MEMBANGUN KOMITMEN POLITIK PRESIDEN HINGGA KEPALA DAERAH

### I. Inventarisasi Komitmen Politik Presiden

Komitmen politik presiden dapat:

1. Mendorong penetapan strategi
2. Membina koordinasi antar kementerian
3. Mempercepat reformasi kebijakan
4. Mengirim sinyal ke sektor swasta untuk bersinergi
5. Menunjukkan bahwa krisis iklim menjadi prioritas tinggi pembangunan negara ke depan

### II. Komitmen Politik Kepala Daerah

Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya, sehingga komitmen kepala daerah juga diperlukan dalam membangun SJP.

## F. MEMBANGUN KOLABORASI LINTAS KEMENTERIAN

Krisis iklim melampaui batas-batas sektoral. SJP perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan semua kementerian dan departemen. Isu krisis iklim harus menjadi isu struktural, bukan sektoral<sup>13</sup>.

### Tata Kelola Inovatif dalam SJP Indonesia

Saat ini, pelaksanaan fungsi pemerintah masih bergantung pada mandat hukum. SJP memerlukan budaya baru yang mendorong pendekatan kolaboratif dalam perencanaan sektoral dan tata kelola yang lebih inovatif, melalui pemberian insentif bagi pejabat pemerintah untuk lebih berani berinovasi dan berkolaborasi di luar tupoksi<sup>14</sup>.

## G. MEMBANGUN KETERLIBATAN PUBLIK DALAM MENYUSUN SJP

Proses penyusunan SJP harus mengadopsi prinsip-prinsip inklusivitas dan transparansi sehingga SJP dapat diterima semua pihak. Pemerintah dapat menggunakan semua mekanisme dengan proses yang melibatkan semua pihak dari level terbawah hingga teratas (*bottom-up*), seperti musrenbang, dari unit desa terkecil hingga tingkat nasional<sup>15</sup>.

### Akses Informasi Publik yang Terbuka

Publik harus memiliki akses terhadap keterbukaan informasi, seperti langkah-langkah yang akan diterapkan, dampaknya pada mata pencaharian, kebutuhan keterampilan, kesehatan, kualitas hidup, perumahan dan sebagainya. Pemerintah juga harus membuka kesempatan bagi masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan<sup>16</sup>.

---

13 World Resources Institute 2018c

14 Hanny Chrysolite, Andhyta Firselly Utami, Dedy Mahardika, Arief Wijaya, Juan-Carlos Altamirano, Mengpin Ge, Melintasi Horizon: Studi Strategi Iklim Jangka Panjang Untuk Masa Depan Indonesia

15 Ibid.

16 Ibid.

## H. MEMPERKUAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI IKLIM DI TINGKAT DAERAH

### Kurang Berjalannya Koordinasi Vertikal.

Rasa kepemilikan dan kapasitas daerah juga berperan penting dalam memastikan efektivitas implementasi rencana yang ada. Sikap proaktif dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan dalam pengembangan pedoman teknis dan implementasi SJP sesuai dengan PP No 61/2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

### Langkah Penguatan Rencana Aksi Iklim Daerah

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengintegrasikan langkah-langkah aksi iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Mengembangkan mekanisme insentif dari pusat sesuai dengan prioritas pembangunan masing-masing provinsi. Insentif dapat berupa dukungan pendanaan dan pengembangan kapasitas yang akan diberikan jika provinsi berhasil mengintegrasikan rencana aksi mitigasi dan adaptasi iklim dengan jelas ke dalam rencana daerah mereka, baik lima tahun maupun tahunan.
3. Mekanisme insentif yang sudah ada dalam perencanaan *top-down* juga bisa dimanfaatkan pemerintah pusat. Misalnya, menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi acuan RPJMN 2020-2024 di tingkat provinsi melalui identifikasi daya tampung dan daya dukung lingkungan.

## I. MENGIDENTIFIKASI INOVASI PENDANAAN

Identifikasi inovasi pendanaan diperlukan untuk mengimplementasikan SJP. Studi Kementerian Keuangan di 2012, menunjukkan bahwa pencapaian target pengurangan emisi tahun 2020 memerlukan pendanaan sekitar US\$ 70,5 miliar. Dana publik yang tersedia dalam anggaran negara hanya sekitar 15 persen dari dana yang dibutuhkan (Kementerian Keuangan, 2012).

**Pembiayaan Aksi Iklim oleh Swasta.** Ke depan, pembiayaan swasta merupakan kunci investasi rendah karbon dan iklim. Untuk mendorong investasi swasta di Indonesia, risiko yang dikhawatirkan investor harus dapat dijawab. Dengan dukungan publik, investasi hijau dapat menggunakan mekanisme pendanaan campuran<sup>17</sup> hingga profil pengembaliannya lebih menarik<sup>18</sup>.

17 Pendanaan campuran adalah paket pendanaan dari mitra pembangunan dan sektor swasta agar risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh sektor swasta, tapi ditanggung bersama sektor publik dan swasta.

18 Chrysolite, et.al., *Op. Cit.*



## BAB IV

# MENYONGSONG FAJAR BARU UNTUK MENGATASI KRISIS IKLIM DI INDONESIA

### TARGET PERTUMBUHAN INDONESIA DI 2045.

Pada 2045 Indonesia menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD 7 triliun, setara dengan PDB negara-negara maju, seperti Belanda dan Jerman<sup>19</sup>. Target itu akan terwujud bila Indonesia dari sekarang mengambil langkah pertumbuhan berkelanjutan yang mempertimbangkan risiko krisis iklim, inklusif dan berkelanjutan. Melalui jalur ini, emisi GRK dapat dikurangi hingga hampir 43 persen pada 2030, melebihi proyeksi rencana aksi iklim nasional. Selain itu, angka kemiskinan ekstrem dapat dikurangi ke tingkat 4,2 persen dari total penduduk (BAPPENAS, 2019).

**Dari Mana Memulai Rancangan SJP Aksi Iklim?** Indonesia dapat menggunakan PPRK sebagai dasar penyusunan SJP. Penetapan dan implementasi SJP aksi iklim ini akan menjadi panduan bagi pengambil kebijakan di negeri ini untuk menggapai mimpi di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-100 tahun.



Sumber: Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, Bappenas - 2019, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunan-rendah-karbon-pergeseranparadigma-menuju-ekonomi-hijau-di-indonesia/>

19 Ibid.



Disusun oleh



✉ [indonesiaoffice@wri.org](mailto:indonesiaoffice@wri.org)

f [/wriindonesia](https://www.facebook.com/wriindonesia)

📷 [@wriindonesia](https://www.instagram.com/wriindonesia)

🐦 [@wriindonesia](https://twitter.com/wriindonesia)

in [linkedin.com/company/wri-indonesia](https://www.linkedin.com/company/wri-indonesia)

🌐 [wri-indonesia.org](http://wri-indonesia.org)

Wisma PMI Lantai 7  
Jl. Wijaya I No.63, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, 12170  
Indonesia

Didukung oleh



Federal Ministry  
for the Environment, Nature Conservation  
and Nuclear Safety

FEBRUARI 2021